



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00006/2025
Lampiran : 1 Halaman

7 Januari 2025

Kepada Yth.

Dewan Komisioner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah ("RUPSU") atas:

- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022;
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022;

yang akan diselenggarakan pada **4 Februari 2025**. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan menyampaikan Pengumuman RUPO dan RUPSU tersebut yang telah dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Terbit dan *website* Perseroan pada hari Selasa, 7 Januari 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat


PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
Mahendra Wijaya
Corporate Secretary

PT PelnI Ungkap Tambahan Penugasan 8 Trayek Tol Laut 2025

Jakarta, HanTer - Tahun 2025 menjadi tantangan pihak PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PelnI (Persero).

PT PelnI mengungkapkan, mendapat penugasan delapan trayek tol laut di tahun 2025 untuk mendukung distribusi logistik di seluruh wilayah Indonesia.

Dijelaskan oleh Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PelnI Kokok Susanto mengatakan bahwa pihaknya kembali mendapatkan kepercayaan Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjalankan penugasan Program Tol Laut untuk tahun anggaran 2025.

"Alhamdulillah, tahun ini kami masih dipercaya untuk melayani delapan trayek. Terima kasih kepada Kementerian Perhubungan," ujar Kokok dalam Pelepasan Pelayaran Perdana Kapal Tol Laut KM Logistik Nusantara 4 Tahun 2025, di Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (6/1/2025).

Menurut Kokok, pihaknya merinci delapan trayek penugasan PelnI untuk Program Tol Laut Tahun Anggaran 2025, meliputi trayek pertama H-1 menggunakan Kapal Motor (KM) Logistik Nusantara 2 dengan rute pelayaran Tanjung Perak-Makassar-

sar-Tahunan-Nunukan-Tanjung Perak.

"Trayek Kedua yakni T-2 menggunakan KM Logistik Nusantara 4 dengan rute pelayaran Tanjung Priok-Tanjung Uban-Letung-Tarempa-Selat Lampa-Subi-Serasan-Midai-Tanjung Uban-Tanjung Priok. Trayek ketiga, T-6 menggunakan KM Logistik Nusantara 3 dengan rute pelayaran Tanjung Perak-Tidore-Jailolo-Tanjung Perak," ulasnya.

Kemudian Trayek keempat, kata dia, T-24 menggunakan KM Logistik Nusantara 1 dengan rute pelayaran Tanjung Perak-Fakfak-Kaimana-Tual-Dobo-Tanjung Perak. Trayek kelima, S-5A menggunakan KM Kendhaga Nusantara 11 dengan rute pelayaran Kupang-Rote-Sabu-Kupang.

Trayek keenam, S-5B menggunakan KM Kendhaga Nusantara 7 dengan rute pelayaran Kupang-Larantuka-Lembata-Kalabahi-Kupang. Trayek ketujuh, T-9 menggunakan KM Logistik Nusantara 5 dengan rute pelayaran Tanjung Perak-Makassar-Morotai-Galela-Maba-Weda-Tanjung Perak. Trayek terakhir, S-4 menggunakan KM Kendhaga Nusantara 8 dengan rute pelayaran Sorong-Oransbari-Waren-Sarmi-Sorong.

Lebih lanjut, kata

Kokok, pada pada tahun 2024, sebelumnya PelnI berhasil memenuhi target 100 persen sebanyak 120 voyage dengan jumlah trayek yang sama. Sementara untuk 2025, PelnI ditargetkan menjalani 118 voyage untuk delapan trayek.

"Jumlah votage tersebut masih mungkin untuk ditambah apabila operasional kapal memungkinkan. Pada tahun ini PelnI mendapatkan tambahan tiga pelabuhan baru, yaitu Nunukan yang disinggahi KM Logistik Nusantara 2 di trayek H-1, Pelabuhan Tual di KM Logistik Nusantara 1 untuk trayek T-24, dan Pelabuhan Tanjung Uban di KM Logistik Nusantara 4. Untuk 2025, total pelabuhan yang disinggahi sebanyak 33 dari 32 pelabuhan di 2024," paparnya.

Selanjutnya, selain penambahan tiga pelabuhan, kata dia, di tahun 2025 terdapat dua pelabuhan yang tidak lagi disinggahi oleh kapal tol laut PelnI yaitu Pelabuhan Patimban dan Pelabuhan Kijang.

"Dalam menjalankan penugasan dari Pemerintah, sebagaimana arahan Kementerian BUMN, PelnI menjalankan operasionalnya secara transparan dan profesional dengan memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik," jelasnya.

■ Danial

KOMISI IX DPR PASTIKAN KAWAL DAN AWASI PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Komisi IX DPR RI akan mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), yang dimulai pada hari Senin (6/1/2025) dan memastikan program Presiden Prabowo tersebut berjalan dengan baik. Sehingga para penerima program MBG bisa menikmati dengan nyaman dan tenang.

Jakarta, HanTer—"Tentu untuk tahap pertama, kita akan evaluasi kekeuangan dan kelebihannya seperti apa. Tentu Komisi IX DPR akan terus mengawal program ini," kata Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Nasdem Nurhadi di Kom-pleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Nurhadi menjelaskan, program MBG ini merupakan program yang sangat baik bagi masyarakat khususnya anak-anak usia



sekolah yang memang memerlukan gizi yang cukup di masa pertumbuhannya.

"Program ini menurut kami sangat bagus, dimana kondisi masyarakat Indonesia khususnya anak-anak serta remaja membutuhkan makanan bergizi," ujarnya.

Menanggapi tentang adanya modus penipuan yang memanfaatkan mo-men program MBG, Nurhadi mengimbau masyarakat untuk waspada dan tidak mudah mempercayai adanya oknum yang menawarkan keimanan program tersebut.

"Biasanya (kalau) ada program bagus, ada oknum-oknum memanfaatkan kepentingan sendiri. Arti-

nya, masyarakat harus coba cari informasi di situs BGN soal makanan bergizi gratis, dan bisa ditanyakan sendiri di situ," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi mengatakan, Badan Gizi Nasional mencatat terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi menjalankan program tersebut mulai 6 Januari 2025. Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau.

Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa

Tengah, hingga Jawa Timur. Kemudian, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN. Kepala SPPG akan bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

■ Safari

Menkop Budi: Penyaluran Dana Bergulir Koperasi Harus Bisa Dongkrak Ekonomi

Jakarta, HanTer—Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menekankan pentingnya fokus penyaluran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk kegiatan produktif di sektor riil, yakni dana yang disalurkan harus memberikan daya ungkit perekonomian nasional.

"Khususnya, kegiatan ekonomi ekstraktif dan kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah," kata Menkop di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Hal itu ia ungkapkan berkaitan dengan rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengamankan Kemkop melalui LPDB-KUMKM mengelola tambahan dana bergulir sebesar Rp10 triliun.

Kedua, lanjutnya, penyaluran dana bergulir harus diselaraskan dengan kebutuhan program kedeputian secara efektif dan optimal, sehingga tidak terjadi duplikasi kegiatan.

Langkah ketiga, kata dia, pengelolaan dana bergulir harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme pengawasan yang komprehensif. "Jika ada mekanisme yang belum jelas, maka harus diperjelas. Jangan berasumsi," tambahna.

Ia pun mengungkapkan langkah yang dapat dilakukan dengan melakukan diskusi Inspektorat Kemkop, menggandeng auditor internal pemerintah, atau pihak lain, untuk memberikan masukan yang independen jika diperlukan.

Dalam kesempatan itu, Budi Arie juga menekankan pentingnya menyelaraskan beberapa hal secara lintas keputian, termasuk LPDB. "Saya berharap SesKemkop dan seluruh deputi segera melakukan pematangan program sesuai sesuai skala prioritas berdasarkan nilai strategis, kompleksitas program, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam waktu dekat, hingga menyusun rencana pelaksanaannya,"

katanya. Baginya, program yang dilakukan harus fokus sebagai upaya menyelesaikan sumber permasalahan yang riil, bukan hanya menyelesaikan gejala.

Lebih jauh, ia mengingatkan peran Menkop adalah memberdayakan koperasi agar semakin inovatif, solutif, dan dipercaya untuk terlibat aktif pada berbagai program prioritas

sektor lain.

Kemkop dapat melakukan upaya tersebut antara lain melalui penyusunan kebijakan strategis, serta penguatan koperasi agar dapat mendukung kegiatan sektor lain.

Sementara itu, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengapresiasi kepercayaan Presiden Prabowo Subianto dengan memberikan komitmen

tambahan dana sebesar Rp10 triliun untuk dikelola LPDB-KUMKM.

Menurutnya hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk mendorong kemajuan koperasi, khususnya untuk mendukung program prioritas pe-

merintah.

Untuk memastikan penyaluran pembiayaan kepada koperasi tepat sasaran dan tepat guna, LPDB akan memastikan koperasi penerima harus sehat dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Supomo

berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dapat segera terbit.

"Kita akan hati-hati untuk

menjalankan program ini, Good Corporate Governance harus kita jaga, hingga mesin kami yaitu SDM juga harus siap," pungkas Supomo.

■ Danial

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menunjuk Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dimuat pada selebaran pengumuman tanggal 23 Desember 2024, berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT Bank Panin Indonesia, Tbk (PT. Bank Panin, Tbk) akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan jenis penawaran melalui internet (e-Auction) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V terhadap aset jaminan debitur atas nama FENI KESUMA berupa:

- 1. (satu) bidang tanah sesuai SHM No. 14599/Cengkareng Barat, luas 56 m², atas nama **GUNAWAN SUSTILO**, berikut bangunan ruko/ruko yang berdiri diatasnya, terletak di Komplek Perum Taman Palem Lestari, Blok D No. 57, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta (Limit lelang Rp. 1.593.900.000,- dan uang jaminan sebesar Rp. 318.780.000,-)

Pelaksanaan Lelang Pada:

- Hari dan Tanggal : Selasa / 21 Januari 2025
- Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi s.d. batas akhir penawaran
- Batas Akhir Waktu Penawaran : 21 Januari 2025, 10:00 WIB (sesuai waktu server)

Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id

Tempat Lelang : KPKNL Jakarta V, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Jak-Pus

Pendaftaran Pemesanan : Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan ketentuan Lelang :

- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta melalui internet (Open Bidding) dengan menggunakan Aplikasi Lelang yang dapat diakses pada alamat domain portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang internet (e-Auction) dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
- Peserta wajib menyertakan uang jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman ini serta harus efektif diterima KPKNL Jakarta V selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- Pemenang lelang akan diumumkan melalui email masing-masing peserta. Pemenang lelang wajib melunasi pokok lelang ditambah 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dilunasi, pemenang lelang akan dinyatakan wangsprestasi dan uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
- Pengenaan BPHBT atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
- Barang dijual dalam kondisi apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, pihak-pihak yang berketerampilan/pemilik lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Jakarta V dan PT. Bank Panin Indonesia, Tbk (PT. Bank Panin, Tbk KCU Sangaji). Calon peserta lelang dianggap dengan sengaja – sengaja sudah mengetahui segala bentuk lelang/konsultasi, bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin timbul di kemudian hari baik dari aspek fisik maupun yuridis/legat, termasuk bersedia memenuhi segala bentuk tunggakan/biaya-biaya yang harus dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku apabila dituntut sebagai pembeli.
- Objek yang dilelang hanya berupa tanah dan bangunan tidak termasuk isi dan segala perlengkapannya.
- Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi: KPKNL Jakarta V atau PT. Bank Panin, Tbk KCU Sangaji Jakarta atau Sdr/I Arie Yulianawati: 08128888963.

KPKNL Jakarta V | PaninBank | Jakarta, 7 Januari 2025 | PT. Bank Panin Tbk KCU Sangaji Jakarta

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996, PT Bank Central Asia, Tbk akan melakukan pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III, melalui jasa pra lelang PT Balai Lelang Surya terhadap aset jaminan debitur atas nama **Rata Dewi Soehartono** berupa:

- Sbidang tanah seluas 302 m² berikut bangunan sesuai SHM No. 5715/Pluit atas nama Dannykim Lal, terletak di Jl. Pluit Karang Ayu II No. 103 Blok. 1-1-U Kav. No. 36 (setempat dikenal dengan Jl. Pluit Karang Ayu II No. 103 (dh. Blok 1-1 Utara Kav. No. 36) RT. 020 RW. 02) Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (Harga Limit Rp. 4.722.900.000,- ; Uang Jaminan Lelang Rp. 1.200.000.000,-)

Pelaksanaan Lelang Pada:

- Hari dan Tanggal : Selasa, 21 Januari 2025
- Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi s.d. batas akhir penawaran
- Batas Akhir Waktu Penawaran : 21 Januari 2025 Pukul 14.15 waktu server aplikasi lelang sesuai WIB

Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id

Tempat Lelang : KPKNL Jakarta III, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat

Pendaftaran Pemesanan : Setelah batas akhir penawaran

Syarat-syarat lelang :

- Pelaksanaan lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta dengan menggunakan Aplikasi Lelang Internet (e-Auction) dengan cara penawaran (Open Bidding) pada domain portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id. Tata cara dapat dilihat pada menu prosedur lelang dan syarat ketentuan pada domain tersebut.
- Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan memiliki akun yang telah terverifikasi pada website portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id.
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.
- Harga penawaran belum termasuk bea lelang pembeli sebesar 2% (dua persen).
- Peserta wajib menyertakan Uang Jaminan yang disetorkan ke rekening Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan, dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Jakarta III selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Pemenang lelang yang ditunjuk wajib melunasi harga lelang dan bea lelang sebesar 2% dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- Pengenaan BPHBT atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
- Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan pemenang lelang belum melunasi harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan wangsprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.
- Objek yang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is), calon peserta diharapkan telah melihat dan mengetahui objek yang akan ditawarkan, berikut semua perkara yang ada bila terjadi gugatan dari pihak lain/debitur setelah lelang, pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Jakarta III, PT. Bank Central Asia, Tbk, dan PT. Balai Lelang Surya termasuk juga bila terjadi pembatalan/pennudanan lelang.
- Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: PT Balai Lelang Surya : (021) 2937 1424, 08129313 1101, 08788440 9611.

Jakarta, 07 Januari 2025
Ttd
KPKNL JAKARTA III | BCA | SURYA | PT. Bank Central Asia, Tbk

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 48, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya ("Perjanjian Perwaliananatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 ("RUPO") di Jakarta, pada hari **Selasa, tanggal 4 Februari 2025**.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliananatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari **Selasa, tanggal 21 Januari 2025**.

Jakarta, 7 Januari 2025

EMITEN | WALI AMANAT
WIKI | BANK MEGA
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK | PT BANK MEGA Tbk

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya ("Perjanjian Perwaliananatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 ("RUPSU") di Jakarta, pada hari **Selasa, tanggal 4 Februari 2025**.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliananatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPSU tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari **Selasa, tanggal 21 Januari 2025**.

Jakarta, 7 Januari 2025

EMITEN | WALI AMANAT
WIKI | BANK MEGA
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK | PT BANK MEGA Tbk